

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- DR. W. Riawan Tjandra, SH. M.Hum. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Indonesia: Kanisius, 2023.
- Manan, Bagir. *Wewenang, Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Pratiwi, Cekli Setya, Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati, and Christina Yulita Purbawati. *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAI*. Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP). Vol. 3, 2015.

Artikel/Jurnal/Penelitian/Makalah:

- Agustian, Sanggup Leonard. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 149. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2370>.
- Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, and Irwan Triadi. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 290–94.
- Nur, Sri, and Hari Susanto. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 2621–2781.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. "Gagasan Negara Hukum Indonesia" 1, tahun 2 (1956): 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.
- Putrijanti, Aju. "Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," no. 30 (2015): 425–30.
- Rafly Hakim, and Muhammad Evan Kurnia. "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 01–13. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.280>.
- Wantu, Fence M. "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 2 (2014): 205. <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>.

Skripsi/Tesis:

Bahri, Samsul. “Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor.05/B/2015/PT.TUN-MDN).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, n.d.

Herlina, M. “Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara.” *Universitas Ekasakti Padang 4* (2021).

Dokumen/Instrumen Hukum Nasional:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pub. L. No. 9 (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dengan (2004).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (2009).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (2021).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (2004).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara pengawasan Ketenagakerjaan (2016).

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014

PT G4S Security Services, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT

PT G4S Security Services, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT

Website/Internet/Sumber lainnya:

“Binwasnaker & K3 : Unit Kerja : Kementerian Ketenagakerjaan RI.” Accessed May 30, 2025. <https://kemnaker.go.id/unit/binwasnaker-k3>.

H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., MH. “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” n.d.

Marpaung, Diory. “Siapa Saja Yang Termasuk Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara? - DHP Law Firm,” 2021. <https://www.dhp-lawfirm.com/siapa-saja-yang-termasuk-badan-atau-pejabat-tata-usaha-negara/>.